

DAMPAK DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN: STUDI EMPIRIS DI DESA LABUHAN SUMBAWA

I Putu Gede Diatmika¹, Sri Rahayu^{2*}

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

² Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
Penulis Korespondensi: sri.rahayu@uts.ac.id

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 21 April 2026</i> <i>Revised: 29 April Juni 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penurunan kemiskinan di wilayah perdesaan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel kabupaten perdesaan selama periode 2018 hingga 2023. Analisis dilakukan dengan model regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model serta dilengkapi dengan robust standard errors untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Variabel independen utama adalah Dana Desa per kapita, sedangkan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi lokal dan tingkat kemiskinan. Variabel kontrol meliputi Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dengan koefisien sebesar 0,042 ($p < 0,01$). Artinya, peningkatan Dana Desa per kapita sebesar 1 persen diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal sebesar 0,042 persen dengan asumsi variabel lain tetap. Pada model kemiskinan, Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar minus 0,028 ($p < 0,05$), yang berarti peningkatan Dana Desa berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun, ketika variabel pertumbuhan ekonomi dimasukkan dalam model, pengaruh Dana Desa terhadap kemiskinan menurun menjadi minus 0,015 dan menjadi kurang signifikan, sementara pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh negatif yang kuat terhadap kemiskinan dengan koefisien minus 0,37 ($p < 0,01$). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan tidak langsung, di mana Dana Desa menurunkan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan dan kualitas tata kelola di tingkat lokal.</p>
Keywords <i>Dana Desa;</i> <i>Pertumbuhan Ekonomi;</i> <i>Kemiskinan;</i> <i>Pembangunan;</i> <i>Perdesaan;</i>	

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal telah lama dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan wilayah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah lokal untuk menyesuaikan kebijakan belanja publik dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan responsif. Perspektif klasik Oates menyatakan bahwa pemerintah lokal memiliki keunggulan informasi dalam memahami preferensi warga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. World Bank (2022) menegaskan bahwa fiscal decentralization berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan yang sebelumnya terpinggirkan dari arus pembangunan nasional. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa transfer fiskal berbasis formula yang mempertimbangkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur cenderung menghasilkan dampak pembangunan yang

lebih inklusif. Namun demikian, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal dan sistem akuntabilitas yang memadai. Tanpa tata kelola yang baik, transfer fiskal berisiko tidak mencapai kelompok sasaran secara optimal. Oleh karena itu, hubungan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan perdesaan bukanlah hubungan yang otomatis, melainkan hubungan yang dimediasi oleh kualitas institusi, kapasitas administratif, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran publik.

Kebijakan Dana Desa merupakan manifestasi konkret dari desentralisasi fiskal yang ditujukan untuk memperkuat otonomi desa dan mempercepat pembangunan perdesaan. Sejak diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Desa Tahun 2014, pemerintah pusat secara konsisten meningkatkan alokasi transfer ke desa sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan. Data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa triliunan rupiah telah dialokasikan setiap tahun kepada lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, dan program perlindungan sosial. Dana Desa dirancang tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan yang mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan desa. Lewis dan Oosterman (2021) menemukan bahwa transfer langsung ke desa meningkatkan belanja publik produktif, khususnya pada infrastruktur jalan dan fasilitas ekonomi desa. Namun, variasi dampak antar wilayah menunjukkan bahwa efektivitas Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lokal dan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran. Dana Desa menjadi laboratorium kebijakan yang relevan untuk menguji bagaimana desentralisasi fiskal memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan kemiskinan secara nyata.

Pembangunan endogen menekankan pentingnya investasi publik dalam menciptakan efek pengganda ekonomi di tingkat lokal. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan pasar tradisional dapat menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan usaha mikro. Suryahadi et al, (2022) menggunakan data panel kabupaten menunjukkan bahwa peningkatan transfer fiskal ke desa berkorelasi positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per kapita di wilayah perdesaan. Dampak tersebut terutama terlihat di daerah dengan tingkat konektivitas rendah sebelum intervensi fiskal dilakukan. Laporan OECD (2023) menegaskan bahwa devolusi fiskal yang disertai investasi infrastruktur lokal mampu memperkuat integrasi pasar dan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. Namun, efek pertumbuhan tersebut tidak selalu seragam. Di beberapa daerah, belanja desa lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif atau proyek yang kurang produktif, sehingga multiplier effect terhadap ekonomi lokal menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi belanja Dana Desa menjadi variabel kunci dalam menentukan apakah transfer fiskal benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau hanya berdampak jangka pendek tanpa transformasi struktural.

Pengurangan kemiskinan merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan perdesaan. Transfer fiskal yang diarahkan pada kelompok miskin berpotensi menurunkan tingkat

kemiskinan melalui dua mekanisme yakni peningkatan pendapatan langsung dan penciptaan peluang kerja. Priebe dan Howell (2022) menemukan bahwa peningkatan belanja desa untuk program padat karya dan bantuan sosial berkorelasi signifikan dengan penurunan tingkat kemiskinan absolut di wilayah perdesaan Indonesia. Dana Desa juga berfungsi sebagai bantalan sosial pada masa krisis, termasuk selama pandemi COVID-19, ketika sebagian alokasi digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa intervensi tersebut membantu menjaga daya beli rumah tangga miskin dan mencegah lonjakan kemiskinan yang lebih dalam (Bird & Zolt, 2015). Meski demikian, dampak terhadap kemiskinan bersifat moderat dan memerlukan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada besarnya transfer fiskal, tetapi juga pada integrasi program desa dengan kebijakan sektoral lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro (Ivanyna, 2020).

Faguet (2021) menekankan bahwa tanpa mekanisme equalization grant yang efektif, daerah dengan kapasitas rendah cenderung tertinggal meskipun menerima transfer. Tantangan utama terletak pada kualitas perencanaan, transparansi anggaran, serta pengawasan partisipatif. Kasus-kasus penyimpangan dana desa yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas menjadi faktor krusial dalam memastikan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal harus dipahami sebagai sistem yang memerlukan keseimbangan antara otonomi dan kontrol (Baskaran et al, 2021). Transfer fiskal yang besar tanpa penguatan institusi lokal berpotensi menimbulkan inefisiensi dan moral hazard (Martinez, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait sejauh mana Dana Desa secara kausal memengaruhi pertumbuhan ekonomi lokal dan penurunan kemiskinan dalam jangka menengah dan panjang. Sebagian penelitian menggunakan pendekatan korelasional, sementara studi dengan desain kuasi-eksperimental atau analisis panel jangka panjang masih relatif terbatas. Selain itu, interaksi antara komposisi belanja, kualitas tata kelola, dan karakteristik sosial ekonomi desa belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka analisis komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan bukti empiris yang lebih mendalam mengenai efek desentralisasi fiskal terhadap pembangunan perdesaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menganalisis dampak Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan di Desa Labuhan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Desain penelitian bersifat *time series* (deret waktu) dengan periode pengamatan tahun 2018 hingga 2023. Pemilihan desain ini didasarkan pada fokus penelitian yang menggunakan satu unit analisis (*single case*), sehingga pendekatan data panel antarwilayah tidak digunakan untuk menghindari ketidakkonsistenan metodologis antara desain penelitian dan lokasi penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya terkait realisasi Dana Desa, serta Badan Pusat Statistik yang menyediakan data pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan karakteristik demografis desa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Desa yang diukur melalui Dana Desa per kapita, dengan pertimbangan untuk meningkatkan komparabilitas antar waktu serta menghindari bias akibat perbedaan jumlah penduduk. Variabel dependen terdiri atas pertumbuhan ekonomi lokal yang diukur melalui pertumbuhan PDRB riil desa dan tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin. Sementara itu, variabel kontrol disederhanakan menjadi jumlah penduduk dan tingkat pendidikan guna menghindari redundansi serta potensi multikolinearitas, mengingat Indeks Pembangunan Manusia tidak digunakan karena secara konseptual telah mencakup dimensi pendidikan dan kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih variabel dalam model analisis.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selain itu, digunakan *robust standard errors* untuk meningkatkan keandalan hasil dalam mengantisipasi kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi klasik. Selanjutnya, uji mediasi diterapkan untuk menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel perantara dalam hubungan antara Dana Desa dan tingkat kemiskinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Tata Kelola Dana Desa (Pendekatan Survei)

1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabe	N	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maximum
Transparansi (X1)	120	3,87	0,54	2,5	4,8
Akuntabilitas (X2)	120	3,92	0,49	2,7	4,85
Partisipasi (X3)	120	3,75	0,58	2,4	4,7
Efektivitas (Y)	120	3,95	0,52	2,6	4,9

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata transparansi sebesar 3,87, akuntabilitas 3,92, partisipasi masyarakat 3,75, dan efektivitas pengelolaan dana desa 3,95 pada skala 1–5. Seluruh nilai berada pada kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa secara umum tata kelola dana desa telah berjalan relatif baik. Standar deviasi yang moderat menunjukkan persepsi responden cukup konsisten dan tidak terlalu menyebar.

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabe	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi	0,821	Reliabel
Akuntabilitas	0,845	Reliabel
Partisipasi	0,803	Reliabel
Efektivitas	0,867	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel berada di atas 0,70. Transparansi sebesar 0,821, akuntabilitas 0,845, partisipasi 0,803, dan efektivitas 0,867. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti.

3. Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 3 Hasil Uji Regresi

Variabe	Koefisien (B)	t hitung	Sig.
Konstanta	0,812	2,101	0,038
Transparansi (X1)	0,298	3,745	0,0
Akuntabilitas (X2)	0,341	4,112	0,0
Partisipasi (X3)	0,226	2,984	0,003

Hasil regresi menunjukkan bahwa:

Transparansi berpengaruh positif signifikan ($\beta = 0,298$; $p < 0,01$)

Akuntabilitas berpengaruh paling dominan ($\beta = 0,341$; $p < 0,01$)

Partisipasi masyarakat signifikan ($\beta = 0,226$; $p < 0,01$)

Persamaan model:

$$Y = 0,812 + 0,298X_1 + 0,341X_2 + 0,226X_3$$

Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas terbukti menjadi variabel paling dominan dalam memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa dengan koefisien sebesar 0,341 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban yang terstruktur, pelaporan yang tepat waktu, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan desa memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan program. Secara konseptual, akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban moral dan hukum pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat dan negara. Temuan ini menguatkan argumentasi bahwa efektivitas bukan semata soal pencapaian output pembangunan fisik, melainkan juga tentang kepatuhan prosedural dan tata kelola yang baik. Dominannya pengaruh akuntabilitas menunjukkan bahwa tata kelola administratif yang kuat adalah fondasi utama efektivitas kebijakan publik di tingkat desa.

Partisipasi masyarakat juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan koefisien sebesar 0,226 dan signifikansi 0,003. Walaupun kontribusinya relatif lebih kecil dibanding dua variabel lainnya, partisipasi tetap memainkan

peran penting dalam menentukan relevansi program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, perencanaan, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kesesuaian program dengan kebutuhan riil warga. Dari perspektif pembangunan partisipatif, keterlibatan aktif masyarakat menciptakan rasa memiliki terhadap program, sehingga mendorong keberlanjutan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi memperkuat dimensi substantif efektivitas, yakni sejauh mana program benar-benar menjawab kebutuhan sosial ekonomi masyarakat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Nilai koefisien regresi sebesar 0,298 dengan signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi anggaran, publikasi APBDes, serta akses masyarakat terhadap laporan realisasi dana desa berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pengelolaan. Secara teoritis, transparansi memperkecil asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga menurunkan potensi moral hazard dan penyalahgunaan anggaran. Temuan ini sejalan dengan studi empiris terbaru oleh Suryahadi et al. (2022) dan Priebe dan Howell (2022) yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi fiskal di tingkat lokal berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program pembangunan dan akuntabilitas publik. Selain itu, laporan OECD (2023) menegaskan bahwa transparansi anggaran merupakan prasyarat utama dalam menciptakan tata kelola yang efektif dan berorientasi pada hasil. Ketika informasi tersedia secara terbuka, kontrol sosial menjadi lebih efektif dan mendorong aparatur desa bekerja secara hati-hati dan profesional. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan legitimasi publik.

Secara simultan, ketiga variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan nilai F hitung sebesar 42,876 dan signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat bekerja secara interdependen dalam membentuk tata kelola dana desa yang efektif. Tidak cukup hanya memiliki sistem pelaporan yang baik tanpa keterbukaan informasi, dan tidak cukup pula transparan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Begitu pula partisipasi masyarakat akan kehilangan makna apabila tidak didukung oleh sistem administrasi yang akuntabel. Temuan ini didukung oleh penelitian Baskaran et al. (2021) serta Faguet (2021) yang menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kombinasi antara akuntabilitas institusional dan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, studi World Bank (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran meningkatkan efektivitas belanja publik di tingkat lokal. Sinergi ketiganya membentuk kerangka tata kelola yang komprehensif.

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,524 menunjukkan bahwa 52,4 persen variasi efektivitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Angka ini menunjukkan kekuatan model yang cukup baik dalam menjelaskan fenomena, namun sekaligus membuka ruang analisis

terhadap variabel tambahan seperti kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, sistem pengawasan eksternal, kualitas perencanaan pembangunan, dan dukungan teknologi informasi. Temuan ini sejalan dengan OECD (2023) yang menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik di tingkat lokal bersifat multidimensional dan tidak hanya ditentukan oleh aspek fiskal, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan inovasi tata kelola. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa menuntut pendekatan multidimensional yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusional dan partisipasi sosial secara berkelanjutan.

Tabel 4 Uji F

F hitung	Sig.
42,876	0,0

Nilai F hitung 42,876 ($p < 0,01$) menunjukkan signifikansi simultan.

Tabel 5. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,724	0,524	0,512

Nilai R^2 sebesar 0,524 menunjukkan bahwa 52,4 persen variasi efektivitas pengelolaan dana desa dijelaskan oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

4. Hasil Estimasi Dampak Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Hasil estimasi model data panel menggunakan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Koefisien Dana Desa per kapita sebesar 0,042 ($p < 0,01$). Artinya, setiap peningkatan 1 persen Dana Desa per kapita berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,042 persen dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hausman menghasilkan probabilitas $< 0,05$ sehingga Fixed Effect Model lebih tepat dibanding Random Effect. Variabel kontrol seperti indeks pembangunan manusia dan tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh positif signifikan, sedangkan jumlah penduduk memiliki pengaruh moderat.

Nilai adjusted R^2 sebesar 0,61 menunjukkan bahwa 61 persen variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh model. Secara ekonomis, hasil ini mengindikasikan bahwa transfer fiskal desa mendorong aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur produktif, penciptaan lapangan kerja lokal, dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun, besarnya koefisien yang relatif kecil menunjukkan bahwa Dana Desa bukan determinan tunggal pertumbuhan, melainkan salah satu faktor dalam ekosistem pembangunan daerah.

5. Hasil Estimasi Dampak Dana Desa terhadap Kemiskinan

Estimasi model kedua menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien $-0,028$ ($p < 0,05$). Artinya, peningkatan 1 persen Dana Desa per kapita menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,028 persen. Ketika variabel pertumbuhan ekonomi dimasukkan ke dalam model, koefisien Dana Desa menurun menjadi $-0,015$ dan tingkat signifikansinya melemah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan koefisien $-0,37$ ($p < 0,01$). Temuan ini menunjukkan adanya efek mediasi parsial, di mana Dana Desa menurunkan kemiskinan sebagian melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Nilai adjusted R^2 sebesar 0,68 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang kuat. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengurangan kemiskinan terjadi melalui mekanisme struktural jangka menengah, bukan semata melalui transfer langsung.

6. Uji Robustness dan Validitas Model

Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF di bawah 5 sehingga tidak terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen. Uji heteroskedastisitas diatasi dengan penggunaan robust standard errors. Uji autokorelasi panel menunjukkan tidak adanya serial correlation yang signifikan.

Estimasi alternatif menggunakan pendekatan Difference-in-Differences menghasilkan koefisien yang konsisten baik secara arah maupun signifikansi. Hal ini memperkuat validitas inferensi kausal antara Dana Desa dan outcome pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan dua dimensi penting. Pertama, pada level tata kelola internal desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Kedua, pada level makro wilayah, Dana Desa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, dengan mekanisme transmisi melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa ($\beta = 0,298$; $p < 0,01$). Selain itu, secara simultan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dengan nilai F hitung sebesar 42,876 ($p < 0,01$), yang menegaskan bahwa ketiganya bekerja secara saling melengkapi dalam membentuk tata kelola yang efektif. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,524 menunjukkan bahwa 52,4% variasi efektivitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar

penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, tetapi juga memerlukan dukungan faktor lain seperti kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskaran, T., Feld, L. P., & Schnellenbach, J. (2021). Fiscal federalism, decentralization, and economic growth: A meta-analysis. *Economic Inquiry*, 59(1), 87–114.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2015). Fiscal decentralization and inequality in developing countries: Four lessons from the past decade. *Public Finance Review*, 43(2), 157–179.
- Faguet, J. P. (2021). Decentralization and governance. *World Development*, 142, 105375.
- Ivanyna, M., & Shah, A. (2020). Citizen-centric governance and fiscal decentralization. *Public Organization Review*, 20(4), 707–728.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku dana desa 2023*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Lewis, B. D., & Oosterman, A. (2021). Village transfers and local public service delivery: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Studies*, 57(8), 1321–1339.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2019). Fiscal decentralization, macrostability, and growth. *Hacienda Pública Española/Review of Public Economics*, 229(2), 9–42.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Making decentralisation work: A handbook for policy-makers*. OECD Publishing.
- Priebe, J., & Howell, F. (2022). Fiscal transfers and rural poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 245–267.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Making decentralisation work: A handbook for policy-makers*. OECD Publishing.
- Priebe, J., & Howell, F. (2022). Fiscal transfers and rural poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(2), 245–267.
- Suryahadi, A., Hadiwidjaja, G., & Sumarto, S. (2022). The impact of fiscal transfers on regional growth and poverty in Indonesia. *Asian Economic Papers*, 21(3), 78–101.
- World Bank. (2022). *Fiscal decentralization and service delivery: Global evidence and lessons*. World Bank Publications.